PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) KOTA PEKANBARU TAHUN 2015-2016

Ichwan Nur Fadillah
Email : ichwannurfadillah23@gmail.com
Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In act No. 2 of 2011 on political parties mention one of the functions of political parties is as a means of political education for members dan the public to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in society, nation and state. This means that all political parties in Indonesia have an obligation to educate the whole society, with materials that have been provided for in Act No. 2 of 2011 on political parties.

This study aimed to describe the role of DPD NasDem Party in providing political education to the people in Pekanbaru city, and the factors inhibiting for political education. The method used is descriptive qualitative, data collection was done by interview and documentation. Sources of data obtained from DPD NasDem Party Pekanbaru, and futhermore, the data obtained from study site will be processed and analyzed further by way of outlining the facts which has been found from the study site.

The results showed that DPD NasDem Party Pekanbaru had done political education to the general public, however, given the political education is not maximized. The several things that affect the political education so that political education was to be not optimal. The study recommends the need for change in providing political education to the people, good change of form of communication, material, and methods of implementation, in order to achieve the real goal of providing political education to the community.

Keyword : political parties, Partai Nasional Demokrat (NasDem), and Political education

Pendahuluan

Partai politik, selanjutnya disebut parpol, merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, dapat dilihat bahwa kehidupan politik modern, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai.

Sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia pada demokrasi, partai politik kembali memainkan peran penting dalam kehidupan politik nasional setelah hampir empat dekade terkungkung dalam sistem yang otoriter. Konstitusi yang makin disempurnakan juga telah memberikan mandat demikian besar bagi partai-partai politik untuk turut menentukan komposisi cabang-cabang *Trias Politica*, yakni

angggota Parlemen, Presiden dan Wakil Presiden, dan pada akhirnya juga menentukan hakim pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tidak ketinggalan pula tentunya komposisi kabinet dan pemerintahan daerah yang ada. Dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun wilayah politik yang luput dari keterlibatan partai politik didalamnya.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Kehadiran partai politik dalam negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi partai politik itu sendiri. Ramlan Surbakti (2010:149) menyatakan bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Namun selain untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat, sedangkan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat (Muhadam Labolo, 2015:20).

Selain sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik, fungsi sosialisasi politik juga berfungsi untuk menciptakan citra (*image*) bahwa sebuah partai politik memperjuangkan kepentingan umum (Muliansyah A. Ways, 2015:135). Dari segi metode penyampaian pesan yang dilakukan, sosialisasi politik dapat dibagi dua, yang salah satunya adalah proses pendidikan politik.

Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap baik dan ideal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tepatnya pada Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik menurut Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami, menghayati, dan mampu mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik juga merupakan sebuah usaha dalam mentrnsformasikan hal-hal yang berkenaan dengan politik kepada pengurus, kader, dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Terciptanya pendidikan politik untuk masyarakat diharapkan mampu menempatkan masyarakat sebagai subyek politik dan bukan hanya sekedar obyek politik seperti yang terjadi pada saat hingar bingar kampanye politik ketika Pemilu akan berlangsung. Sehingga interaksi partai politik dan masyarakat seringkali hanya terjadi pada waktu pemilu akan berlansung melalui pelaksanaan kampanye politik dari partai, namun setelah proses tersebut interaksi tersebut terputus (Muliansyah A. Ways, 2015:147).

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat proses pelaksanaan pendidikan politik untuk masyarakat yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kota Pekanbaru. Partai NasDem merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Partai NasDem berdiri dengan membawa semangat perubahan baru yang dikemas dalam tujuan untuk melakukan Gerakan Restorasi Indonesia. Salah satu sasaran dari Gerakan Restorasi Indonesia tersebut yakni perubahan pola pikir masyarakat

dalam kehidupan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang telah jelas tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Pekanbaru pertama kali terbentuk yakni pada tanggal 27 Agustus 2012. Selaras dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai, disebutkan pada pasal 12 bahwa Partai NasDem wajib melaksanakan pendidikan politik baik pendidikan politik secara internal yang diperuntukkan kepada anggota, pengurus atau kader partai serta pendidikan politik eksternal yang diperuntukkan kepada masyarakat.

Materi serta metode penyampaian pesan pun dalam proses pendidikan politik ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk pendidikan politik secara internal, materi yang disampaikan berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader serta untuk peningkatan kualitas kader untuk dapat berfikir futuristik. Sedangkan untuk pendidikan politik secara eksternal atau untuk masyarakat materi yang disampaikan meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bernegara.

Pada periode awal terbentuknya DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru, yakni rentang waktu 2012 hingga 2014, Partai NasDem Kota Pekanbaru sibuk melakukan pelembagaan partai atau sibuk mempersiapkan verifikasi partai untuk mengikuti proses Pemilu di tahun 2014. Dan proses pendidikan politik yang dilakukan pun terjadi ketika proses kampanye politik diselenggarakan. Partai NasDem sendiri juga tertolong dengan pemberitaan di media massa ataupun media elektronik seperti televisi atau portal berita online. Hal ini dikarenakan Surya Paloh selaku salah satu figur di partai ini juga merupakan pemilik salah satu saluran televisi nasional. Untuk di tahun 2015, apabila dilihat dari hasil perolehan suara di kursi legislatif Kota Pekanbaru, Partai NasDem mendapatkan 3 kursi sehingga berhak dana Bantuan Politik (Banpol) oleh pemerintah daerah guna menjalankan operasional partai baik agenda maupun program-program partai yang ada.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk melihat proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari pendahuluan tadi, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem untuk masyarakat Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan politik tersebut?

Kerangka Teoritis

1. Partai Politik

Partai politik yaitu sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilau atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum (Sigit Pamungkas, 2011:5). Dari definisi tersebut, beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, partai politik merupakan entintas yang bekerjanya didasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian serta pelaksanaan, dan kontrol. Dan tentunya ada aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi.

Kedua, partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai atau ideologi. Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Nilai atau ideologi itu diyakini kebenarannya oleh kolektivitas individu yang tergabung dalam organisasi itu. Pada kerangka ini, nilai atau ideologi itu memiliki beberapa fungsi, yakni, pertama,

pada tingkat paling minimal sebagai corak atau ciri khas yang membedakan dirinya dengan partai lain. Kedua, menjadi pisau analisis partai dalam memahami realitas.

Terakhir, ideologi tersebut berfungsi sebagai pemandu perilaku partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Partai politik setidaknya memainkan salah satu atau semua hal dari ideologi tersebut. Jika sebuah partai mendeklarasikan dirinya sebagai partai sosialis, nasionalis, atau agama maka klaim atas nilai atau ideologi tersebut setidaknya menjadi identitas, alat analisis, atau penuntun keseluruhan perilaku individu dan organisasi partai.

Ketiga, perjuangan partai adalah melalui penguasaan struktrur kekuasaan. Dengan demikian, partai sesungguhnya adalah berorientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, memperluas kekuasaan dan mengelola kekuasaan. Yang harus dicatat adalah kekuasaan tersebut direbut dalam rangka implementasi nilai atau ideologi yang mengikat partai, bukan semata-mata mengejar kekuasaan.

Takdir partai politik adalah untuk berburu kekuasaan, tentu saja dengan sejumlah etika yang membatasinya. Hanya saja, ketika kekuasaan sudah diraih, kekuasaan yang diperoleh partai politik tersebut tidak semata-mata diorientasikan untuk kekuasaan. Kekuasaan itu kemudian diorientasikan untuk kebaikan bersama.

Ada berbagai definisi yang diberikan oleh para ilmuwan politik. Carl Friendrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu, Soltau menjelaskan partai politik sebagai sedikit banyak yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat (Surbakti, 2010:148).

Kemudian bagi Sigmund Neumann, partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan-golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Artinya organisasi politik yang artikulatif terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan programnya dan menancapkan ideologinya kepada kepentingan bersama.

Sementara itu, dalam kepustakaan ilmu politik terkait peranan dan fungsi partai politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan sebagai berikut (Gaffar dan Amal dalam Fadjar, 2013:18) :

a. Dalam proses pendidikan politik
b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara
c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan
d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Dalam negara demokrasi modern, fungsi partai politik secara umum adalah sebagai berikut :

a. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan serta menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan

kepada pemerintah, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota partai politik yang bersangkutan),

b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses untuk seseorang atau individu memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik dapat memberikan dan menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Istilah sosialisasi politik merupakan istilah yang longgar pengertiannya, istilah yang ketat pengertiannya adalah pendidikan politik,
c. Sebagai sarana rekrutmen politik, yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa,
d. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.

2. Pendidikan Politik

Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan apapun jenisnya, tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Pendidikan politik tersebut menurut Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) merupakah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Pada umumnya pendidikan politik yang dilaksanakan negara bertujuan untuk mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), menyamakan sistem berfikir tentang nilai-nilai yang dapat mempedomani aktivitas kehidupan bernegara, memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai-nilai religius, sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem nilai (Soemarno, AP. 2002). Pendidikan politik ialah suatu proses mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing yang sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan (Labolo, 2015:20).

Pada konteks ini, pendidikan politik sudah sangat jelas tujuannya guna membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan partisipasi politik pada individu, agar nantinya individu tersebut menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Hal ini telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa proses pendidikan politik bertujuan untuk proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun tujuan pendidikan politik (Kartini Kartono, 1996:68) yaitu :

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat, dan seterusnya) :
   a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik,
   b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap,
   c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara,
   d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan :
   a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya),
   b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik),
   c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, pendidikan politik oleh partai politik juga bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik serta kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi pada individu agar menjadi partisipan politik yang aktif dan positif (Priatmoko, 2003:180). Partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pengurus, kader partai serta masyarakat luas. Pendidikan politik tersebut dapat disampaikan melalui metode dan materi penyampaian sebagai berikut (Labolo, 2015:21) :

1. Materi pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristik. Sedangkan materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara.

2. Metode pendidikan

Berdasarkan penjabaran materi pendidikan diatas, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai maupun masyarakat berbeda. Hal ini juga disebabkan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk *mindset* mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan media massa sebagai perantara.

Adapun tujuan dari pendidikan politik yakni dapat membentuk, sebagai berikut :

a. Kepribadian politik

Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian politik merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Oleh karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik di

dalamnya. Dan juga tingkat partisipasi politik juga dipengaruhi oleh jenis kultur yang membentuk kandungan kepribadian politik.

b. Kesadaran politik

Kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, yang ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik. Lebih tepatnya, merupakan sebuah pengetahuan yang kritis serta pandangan yang benar terhadap suatu realitas.

c. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela atau sebuah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, serta mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau bergabung dengan organisasi-organisasi mediator. Pendidikan politik yang diberikan secara maksimal dan berkelanjutan akan berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik dari masyarakat.

Kerangka Pemikiran

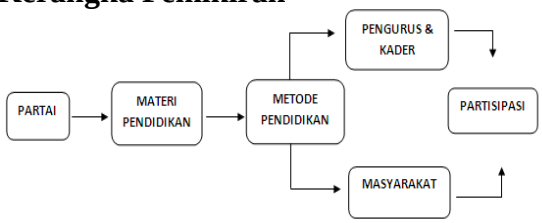

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

Pembahasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap rakyat di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dalam bentuk apa pun. Pendidikan ini pula yang nantinya akan membentuk karakter dari setiap masyarakat Indonesia demi memajukan peradaban dan mencapai tujuan negara lainnya yakni kesejahteraan rakyat. Dengan komitmen yang telah dibangun oleh Negara Indonesia untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, partai politik muncul sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, serta sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun kesejahteraan negara.

Partai politik merupakan sebuah sarana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Namun selain mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai sebuah proses guna memperoleh serta membentuk sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik yang berada dalam kehidupan bernegara.

Dalam arti lainnya, sosialisasi politik ini disamakan dengan proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sosialisasi politik memiliki dua metode penyampaian pesan, yang mana pendidikan politik merupakan salah satu klasifikasinya (Labolo, 2015:20).

Partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik yang ada di Indonesia wajib mengadakan sebuah pendidikan politik. Hal ini sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 31 ayat 1 bahwa partai politik wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bernegara serta meningkatkan partisipasi politik dan membentuk budaya politik sesuai Pancasila.

Kewajiban partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat juga sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Afan Gaffar dan Ichlasul Amal dalam Abdul Mukhtie Fadjar (2013:18), bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik selain kepada anggota dan kader partai, juga untuk masyarakat pada umumnya guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak politiknya. Hal ini selaras dengan Anggaran Dasar Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Bab VI Tentang Sistem Kaderisasi Pasal 12 ayat 1 bahwa partai menjalankan fungsi pendidikan politik baik secara internal maupun eksternal.

Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai jenjang dalam sistem kaderisasi. Sedangkan pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh warga negara berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan. Sederhananya, pendidikan politik internal bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader dalam menghadapi situasi politik yang berkembang. Dan pendidikan politik eksternal atau pendidikan politik untuk masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri.

Pendidikan politik merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka menghayati dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun. Metode penyampaian pendidikan politik pun dilakukan dengan cara berbeda, seperti untuk kader atau anggota partai dilakukan pertemuan secara intensif guna menanamkan loyalitas serta pembentukan sikap politik yang ideal guna menjalankan program partai yang telah ditentukan. Sementara itu, pendidikan politik untuk masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yakni melalui perantara media, baik media massa ataupun media eletronik yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis melihat kepada proses pendidikan politik untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem untuk wilayah Kota Pekanbaru. Pengurus DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru pertama kali terbentuk pada tanggal 27 Agustus 2012. Pada perkembangannya, pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru lebih banyak berorientasi kepada pendidikan politik internal, atau pendidikan politik untuk kader ataupun anggota partai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pengurus DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru, jelas terlihat bahwa pendidikan politik untuk masyarakat Kota Pekanbaru belum terlalu maksimal dilakukan oleh partai. Untuk rentang waktu di tahun 2012 menjelang Pemilu 2014, DPD Partai NasDem fokus untuk pelembagaan partai atau

institusionalisasi partai untuk persiapan verifikasi mengikuti Pemilu di tahun 2014.

Bahkan pengurus dari DPD Partai NasDem sendiri juga mengakui bahwa proses pendidikan politik untuk masyarakat Kota Pekanbaru banyak tertolong dari perkembangan media yang ada, baik media massa ataupun media elektronik. Dalam awal perkembangannya, DPD Partai NasDem melakukan pendidikan politik hanyalah untuk memperkenalkan Partai NasDem kepada masyarakat Kota Pekanbaru, dengan membawa semangat Gerakan Restorasi Indonesia.

Seperti yang telah dijabarkan pada pendahuluan diatas, bahwa salah satu sasaran utama dari Gerakan Restorasi Indonesia yang Partai NasDem kembangkan yakni perubahan pola pikir masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar mencapai tataran kehidupan ideal sesuai tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Artinya dibutuhkan pendidikan politik kepada masyarakat yang intensif atau berkelanjutan guna membentuk masyarakat yang sadar akan fungsi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara.

1. **Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Nasional Demokrat (NasDem) Untuk masyarakat Kota Pekanbaru**

Apabila dilihat dari hasil yang diperoleh dengan mengacu kepada hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2014, Partai NasDem memperoleh 165.854 suara dari 2.669.684 jumlah suara sah Dapil yang ada di dalam pendataan KPU. Sementara itu, untuk tingkat Kota Pekanbaru Partai NasDem mendapat 3 kursi di DPRD Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil tersebut pula, untuk tingkat Kota Pekanbaru Partai NasDem berhak mendapat dana Bantuan Politik dari Pemerintah Daerah guna membiayai operasional partai dan program serta agenda partai lainnya termasuk agenda pendidikan politik yang dilakukan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru, yakni Zulfan Hafiz, ST.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, Partai NasDem Kota Pekanbaru mendapat bantuan dana Bantuan Politik sebesar Rp. 62.618.500 di tahun 2015. Dan perincian penggunaan dana tersebut antara lain untuk :

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi (Rp)
A.	Pendidikan Politik	
1	Sekolah Legislatif atau Sekolah Restorasi I Partai NasDem	34.275.000
2	Pendidikan Politik Bagi Perempuan	3.100.000
3	Pelatihan Kader Partai NasDem Kota Pekanbaru	2.487.500
4	Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Partai NasDem Kota Pekanbaru	16.525.000
B.	Operasional Sekretariat	
1	Keperluan ATK	871.000
2	Rapat internal Sekretariat	700.000
3	Telepon dan Listrik	1.385.000
4	Pemeliharaan peralatan kantor	3.275.000
C.	Total	62.618.500 (-9310)

Sumber : Data Olahan Penulis, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang dikucurkan juga digunakan untuk biaya operasional kesekretariatan serta pemeliharaan kantor DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru, sehingga dana yang diterima tidak begitu mencukupi apabila hanya digunakan untuk mengadakan proses pendidikan politik untuk masyarakar Kota Pekanbaru.

Dikarenakan pada tahun 2012 hingga menjelang Pemilu 2014 Partai NasDem Kota Pekanbaru fokus pada pelembagaan partai serta mempersiapkan verifikasi partai dalam mengikuti Pemilu 2014, sehingga proses pendidikan politik untuk masyarakat hanya dapat dilakukan secara langsung ketika memasuki tahun 2015. Berikut beberapa agenda pendidikan politik yang telah dilakukan oleh Partai NasDem Kota Pekanbaru selama tahun 2015 dan tahun 2016 baik secara internal partai ataupun untuk masyarakat Kota Pekanbaru :

A. Pendidikan Politik Internal

1. Sekolah Legislatif
2. Pelatihan Kader Partai NasDem Kota Pekanbaru
3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai NasDem Kota Pekanbaru

Pendidikan politik internal ini bertujuan untuk menciptakan kader partai yang berkualitas sehingga mampu menginternalisasi nilai-nilai partai yang tertuang dalam visi dan misi serta garis politik partai.

B. Pendidikan Politik Eksternal

1. Pendidikan Politik Bagi Perempuan di Kecamatan Tampan dan Payung Sekaki
2. Pendidikan Politik Bagi Juru Rawat dan Kebidanan Bekerjasama Dengan Ikatan Perawat Indonesia Cabang Riau
3. Diskusi Publik Tentang Peran Partai Politik Sebagai Penyambung Aspirasi Warga
4. Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Dhuafa

Sementara itu, untuk pendidikan politik kepada masyarakat ini masih berkutat kepada pengenalan partai secara luas, sehingga metode komunikasi yang dibangun adalah komunikasi satu arah dari komunikator (partai) kepada penerima pesan (masyarakat). Penulis menganalisa proses pendidikan politik untuk masyarakat ini cenderung lebih kepada pemaksaan stimulus kepada masyarakat untuk mengakui eksistensi partai.

Pola komunikasi satu arah ini penulis pandang tidak memberikan pengaruh terhadap kecerdasan masyarakat, justru dengan pola yang demikian membuat masyarakat terkungkung dalam pemikiran bahwa semua partai politik sama saja tujuannya, yakni hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk kepentingan Pemilu. Namun tidak semua kegiatan yang Partai NasDem lakukan bersifat komunikasi satu arah, ada beberapa kegiatan dari Partai NasDem sendiri yang bersifat komunikati seperti kegiatan serap aspirasi.

Namun kegiatan serap aspirasi tersebut hanya dilakukan ketika masa *reses* yang dilakukan kader partai yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru. Masa *reses* bukanlah ajang pendidikan politik untuk masyarakat, namun hal tersebut adalah kewajiban dari setiap anggota DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini juga dibenarkan oleh Tarmizi Akhmad dan Zulfan Hafiz selaku kader Partai NasDem yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru.

Kelemahan dari Partai NasDem sendiri adalah ketergantungan pengurus kepada kader partai yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut juga diakui oleh pengurus yakni Rahmad Rishadi kepada penulis dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan di Kanto DPD Partai NasDem Kota Pekanbaru. Tidak adanya *reward and punishment* serta kontrol dari lembaga pemerintahan terhadap partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat membuat partai politik kurang memperhatikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat juga tidak sebagaimana seharusnya, pendidikan yang diberikan kerap kali masih sebatas pada promosi calon dan partai politik.

Reward and punishment tersebut dapat dibuat seperti perankingan terhadap kinerja dari partai politik yang ada. Kemudian hasil penilaian disebarluaskan

kepada publik, sehingga publik dapat menilai mana partai politik yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pada waktu berikutnya.

2. Faktor Penghambat

Ditemukan beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan politik untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Partai NasDem. Penulis melihat faktor pendanaan merupakan masalah utama. Hal tersebut merupakan sebuah keterbatasan yang selalu menjadi momok partai dalam melaksanakan beberapa kegiatan ataupun program partai untuk proses pendidikan politik kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

Walaupun pada tahun 2015 Partai NasDem Kota Pekanbaru mendapatkan dana Bantuan Politik dari pemerintah, hal tersebut tidaklah cukup untuk dapat menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan dari dana tersebut juga digunakan untuk membiayai operasional sekretariat partai yang ada.

Faktor lainnya juga sikap apatis dan *skeptis* dari masyarakat yang menganggap semua partai sama saja, yaitu datang kepada masyarakat hanya untuk memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan ketika Pemilu dilakukan. Hal ini terjadi, dikarenakan tidak adanya komitmen dari para kader atau anggota partai untuk benar-benar melakukan pendidikan politik yang bertujuan mencerdaskan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih bergantungnya kader Partai NasDem terhadap proses masa *reses* sebagai prose serap aspirasi yang dilakukan oleh kader partai yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

1. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem Kota Pekanbaru masih berorientasi kepada pendidikan politik internal partai, yang mana pendidikan politik itu diberikan untuk anggota serta kader partai seperti Sekolah Legislatif dan Pelatihan Kader Partai. Sedangkan pendidikan politik untuk masyarakat masih sangat minim dilakukan, dan hanya tertolong dengan bantuan media baik media massa dan media elektronik yang ada dalam pemberian pendidikan politik.
2. Realisasi pendidikan politik untuk masyarakat Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa hambatan, yakni ketergantungan anggota atau kader partai terhadap masa *reses* yang dilaksanakan oleh kader Partai NasDem yang duduk di DPRD Kota Pekanbaru sehingga banyak anggota atau kader partai beranggapan dengan masa *reses* tersebut pendidikan politik untuk masyarakat juga telah terselenggara. Hambatan lainnya yakni keterbatasan anggaran partai yang akan dialokasikan untuk pendidikan politik bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya dapat memberikan *reward and punishment* serta kontrol terhadap partai-partai politik yang ada dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Pekanbaru, dengan melakukan perankingan terhadap kinerja partai politik yang kemudian hasilnya disebarluaskan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai mana partai politik yang menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam proses Pemilihan Umum yang dilakukan.
2. Membangun *political will* terhadap seluruh anggota partai hingga ke struktur terendah agar terus bersinergi dengan agenda Restorasi Indonesia, yang pada dasarnya membutuhkan pendidikan politik

untuk masyarakat secara berkelanjutan agar dapat merubah paradigma atau *mind set* dari masyarakat itu sendiri bahwa Partai NasDem tidak hanya datang kepada masyarakat ketika Pemilu akan dilaksanakan. Serta mengoptimalkan Bantuan Politik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Aditya, Willy. 2013. *Indonesia Di Jalan Restorasi : Politik Gagasan Surya Paloh*. Jakarta. Populis Institute.

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Amal, Ichlasul. 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana.

Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka OBOR.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara

Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Mukthie Fadjar, Abdul. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).

Muliansyah A. Ways. 2015. *Political : Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*. Yogyakarta. Buku Litera.

Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Grasindo.

Jurnal

Noor, Firman. 2012. *Evaluasi Kondisi Kepartaian 14 Tahun Reformasi Dalam Perspektif Pelembagaan Sistem Kepartaian* dalam Jurnal Masyarakat Indonesia : Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Volume 38 Nomor 2 Desember 2012. Jakarta: LIPI Press.

Medelina K. Hendytio.dkk. *Kebijakan Tentang Akses Dan Informasi SertaPartisipasi Publik Dalam Proses Legislasi*. Dalam Analisis CSIS "Representasi Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi. Jakarta. CSIS. Volume 41 Nomor 4 Desember 2012.

Dalam Jurnal Online Ayub Budi Prayoga. *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2016, pukul : 01.48 WIB

Jurnal Online Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional. Adi Soeprapto. *Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 04.30 WIB

Skripsi Ahmad Syaiful Ashar. 2011. *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang*. Diakses melalui jurnal online pada 22 Juni 2016 pukul 22.45 WIB

Dr. Hasanuddin, M.Si, Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si, dan Drs. Ishak, M.Si dalam jurnal online. *Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 01.28 WIB

Sumber Lainnya

Skripsi Ferry Farisca. 2014. *Upaya Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional*

Demokrat Pekanbaru Dalam Memenuhi Syarat Verifikasi Partai Politik Tahun 2012. Pekanbaru. JOM FISIP.

Tesis Tito Handoko. 2012. *Studi Komparasi Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Pekanbaru Tahun 2004-2009*.

Dokumen

Dokumen Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Tahun 2011 di Jakarta.

Platform Politik Partai NasDem Pada RPJMN 2015-2019. *Bobot Pembangunan : Ekonomi, Prasarana-Sarana Dan SDA-LH*. Oleh Dr. Siti Nurbaya, M.Sc. Padang, Februari 2014. Diakses pada tanggal 1 April 2016. Pukul : 19.38

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.